

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia resmi memasuki era baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengawali masa kepemimpinan mereka dengan mengusung visi pemerintahan disebut sebagai Asta Cita untuk mencapai visi, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk jajaran Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian. Jumlah yang banyak ini menuai berbagai kritik dari publik menyebut bahwa Kabinet Merah Putih sering kali disebut sebagai Kabinet Gemuk.

Selain itu, Presiden Prabowo dan wakilnya, Gibran memiliki program unggulan yang sudah digadang-gadang sejak awal dari pencalonan presiden dan wakil presiden. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program yang dirancang untuk mengatasi permasalahan serius dan menurunkan angka malnutrisi di Indonesia. Program ini bertujuan juga untuk memastikan terpenuhinya asupan gizi tercukupi dengan baik sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Program ini memiliki sasaran balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, pada saat pelaksanaan MBG, menuai berbagai permasalahan. Isu krusial yang muncul meliputi keterbatasan alokasi anggaran, hambatan

penyaluran makanan pada pelaksanaannya, rendahnya kualitas kandungan gizi pada makanan, hingga dampak lingkungan yang akibat limbah dari kebijakan tersebut (Abhiyoso, 2025).

Untuk menunjang program MBG dan berbagai program kerja yang sudah digadang-gadang oleh Pemerintahan Prabowo sejak ia mencalonkan diri, pemerintahan Prabowo mulai mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan memangkas berbagai kebutuhan setiap kementerian. Namun, hal ini mendapatkan kritik karena dianggap bertentangan dan berisiko memberikan dampak buruk terhadap pelayanan publik. Efisiensi anggaran belanja menjadikan banyak sektor yang terdampak seperti, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga membuat daya beli masyarakat menurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pada 100 hari pertama pada Kabinet Merah Putih menjadi pondasi penting sebagai langkah awal untuk menilai arah kebijakan, pengambilan keputusan strategis dan mengatasi permasalahan bangsa. CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yang ditulis oleh Askar et al. (2025) mengeluarkan “Rapor 100 Hari Prabowo Gibran (Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum)”. Studi ini memiliki tujuan untuk menyajikan data analisis yang mengupas berbagai pencapaian, tantangan, dan potensi perbaikan pada kabinet baru ini.



Gambar 1. 1 Rapor 100 Hari Prabowo Gibran

Sumber: CELIOS (Center of Economic and Law Studies) (2025)

Berdasarkan data diatas, evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini mendapat sorotan tajam dari publik. Sebagaimana tercermin dalam data survei, memperlihatkan rapor yang belum memuaskan dan ekspektasi tinggi masyarakat masih jauh dari kata terpenuhi. Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan 100 hari pertama justru memunculkan banyak tanya dibandingkan jawaban. Rakyat yang semula menaruh harapan pada kepemimpinan Prabowo-Gibran kini mulai meragukan dan memunculkan keresahan masyarakat terkait dengan berbagai kebijakan yang muncul.

Keresahan ini memicu demonstrasi yang disebabkan sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu fenomena yang tidak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Aksi demonstrasi di Indonesia dapat

dipicu oleh berbagai faktor, seperti kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, isu sosial dan ekonomi, serta tuntutan akan keadilan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mulai menjadi *trending topic* tagar di media sosial X pada 17 Februari 2025, tagar ini mencapai posisi pertama dengan jumlah postingan lebih dari 81.900 cuitan (Mahendra, 2025). Seiring berjalannya aksi ini hingga pada tanggal 23 Februari 2025 berdasarkan pemantauan Research Hub, tagar Indonesia Gelap mencapai 3 juta cuitan pada platform X (Muzakki, 2025).

Tagar ini menjadi tema demonstrasi untuk menuntut sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Istilah Indonesia Gelap ini memiliki makna sebagai ekspresi kecemasan warga Indonesia terhadap masa depan bangsa dan menggambarkan serangkaian demonstrasi dan aksi protes yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan pemerintah (Toruan, 2025). Pemilihan tagar ini juga mengungkapkan adanya kebalikan dari cita-cita pemerintah terhadap generasi muda. Fenomena ini mencakup berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya. Selama 17-21 Februari 2025, mulai dari masyarakat sipil hingga mahasiswa menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap di berbagai daerah.

Titik aksi demonstrasi ini berada di depan Gedung DPRD masing-masing kota di daerah. Aksi Indonesia Gelap ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Pemerintah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberlakuan Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pemotongan anggaran ini diakibatkan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Demonstran menganggap kebijakan yang dikeluarkan perlu koreksi dan dipertimbangkan ulang. Berikut 13 tuntutan pada aksi demonstrasi Indonesia Gelap:



Gambar 1. 2 Tuntutan Demonstrasi Indonesia Gelap

Sumber: X.com/@bijakmemantau (2025)

Akibat dari demonstrasi Indonesia Gelap masyarakat menyoroti banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di instansi pemerintahan terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran. Demonstrasi ini sebuah tema yang tajam untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Slogan Indonesia Gelap sendiri berasal dari tagar yang populer di X yaitu #IndonesiaGelap.

Indonesia gelap sendiri memiliki maksud berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kian hari kian gelap dan jauh dari kata “terang”. Padahal pemerintah yang menggaungkan “Indonesia Emas 2045”, tetapi fakta menyatakan bahwa lapangan untuk generasi muda nasibnya semakin abu-abu dan banyak kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Pelaksanaan aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan Aksi Kamisan, yang merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap hari Kamis di depan Istana Negara oleh korban pelanggaran HAM di Indonesia. Gerakan demonstrasi ini perlu dilakukan agar gerakan sosial tidak hanya berhenti pada ruang digital atau media sosial saja. Inisiatif gerakan ini bermula dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang kemudian mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut serta turun ke jalan. Pemicu utama demonstrasi ini adalah isu pemangkasan anggaran pendidikan, yang mencuat setelah rapat kerja antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dengan DPR pada pertengahan Februari 2025. Dalam rapat tersebut dibahas pengurangan dana operasional bagi perguruan tinggi, yang dinilai berpotensi menghambat akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia (Mahendra, 2025).

Dalam konteks pemberitaan, media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap gerakan demonstrasi "Indonesia Gelap" melalui berbagai strategi pembingkaian (*framing*). Media cenderung mengemas peristiwa ini dengan beragam perspektif, mulai dari menekankan aspek ekonomi berupa protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga menyoroti kebijakan pemerintah. Sebagian media memilih untuk menonjolkan aspek sosial,

terutama kesulitan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara media lain membingkainya sebagai gerakan yang dipolitisasi oleh kelompok oposisi atau sebaliknya sebagai gerakan murni yang berakar dari keresahan masyarakat (Febriani et al., 2022).

Di sisi lain, platform media sosial dan media independen menyediakan ruang bagi berkembangnya narasi alternatif yang sering kali berbeda dengan yang ditampilkan media arus utama. Platform seperti X, Instagram, dan TikTok menjadi saluran bagi para demonstran dan pendukung aksi untuk menyebarkan dokumentasi langsung dari lapangan, menciptakan narasi tandingan yang lebih otentik. Video-video mengenai aksi secara serempak sebagai simbol protes menjadi viral dengan cepat, menciptakan narasi visual yang kuat dan mudah dikenali. Hashtag terkait gerakan ini pun menjadi trending di berbagai platform media sosial, membangun solidaritas virtual, dan memperluas jangkauan pesan demonstrasi melampaui batasan geografis (Savero, 2024).

Pemilihan bahasa dan elemen visual dalam pemberitaan juga memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik. Penggunaan istilah seperti "demonstrasi", "aksi protes", atau "kerusuhan" memberikan nuansa dan konotasi yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Demikian pula dengan visual yang dipilih media, apakah menampilkan massa yang tertib dan damai, kelompok yang berhadapan dengan aparat keamanan, atau insiden-insiden sporadis yang terjadi di tengah demonstrasi, sangat memengaruhi kesan yang tertanam dalam benak audiens. Hal ini menunjukkan bahwa liputan media tentang Indonesia Gelap tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga turut membentuk realitas sosial

dan politik yang dipersepsikan masyarakat. Dinamika pembingkaian media terhadap demonstrasi Indonesia Gelap ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara media, aktivisme, dan persepsi publik dalam lanskap sosial-politik Indonesia kontemporer.

Portal media *online* yang memberitakan terkait dengan aksi Indonesia Gelap salah satunya adalah Tempo. Media Tempo merupakan media yang sangat kritis dengan pembawaan berita yang terpercaya dengan nilai kejujura, integritas, dan konsistensi. Tempo memberikan fitur kepada pembacanya berupa berita pilihan, video populer, halaman berita utama, teknologi, bola, hingga data statistik berita. Informasi yang disampaikan oleh Tempo jelas dan memiliki data sesuai dengan pemberitaan di lapangan (Maulana, 2022).

Pemilihan Tempo sebagai subjek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu media *online* nasional yang dikenal kritis dalam memberitakan isu-isu sosial dan politik. Kepemilikan oleh Tempo Media Group yang independen, tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Nilai budaya yang dianut Tempo mencakup prinsip tepercaya, merdeka, dan profesional. Nilai tepercaya diwujudkan melalui komitmen terhadap kejujuran, integritas, serta konsistensi dalam menjalankan praktik jurnalistik. Prinsip merdeka menekankan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi tanpa tekanan, sementara profesional mencerminkan kemampuan dan keahlian tinggi yang dimiliki insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi di bidang jurnalistik (Tempo Media Group, n.d.). Tempo tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyusun berita dengan sudut pandang tertentu melalui pemilihan isu, narasumber, dan

bahasa yang digunakan. Tempo juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip independensi, ketidakberpihakan, dan kode etik jurnalistik melindungi staf redaksi Tempo. Untuk menegakkan prinsip-prinsip ini, semua jurnalis Tempo tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik, menjadi administrator partai politik, atau aktif dalam mengadvokasi isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk aktif berkampanye untuk mendukung kandidat politik (Kasuya & Haristya, 2025).

Media memiliki fungsi sebagai ruang interpretasi atas berbagai isu, sehingga mampu mengkaji peristiwa yang tengah berlangsung. Selain menyampaikan informasi, media juga berperan sebagai sarana untuk mengkritisi kebijakan pemerintah (Hidayah & Riauan, 2022). Dengan *platform* digital yang kuat dan kredibilitas yang dibangun, Tempo menjadi sumber informasi utama bagi segmen masyarakat Indonesia yang teredukasi dan berpengaruh, termasuk membuat kebijakan, akademisi, dan kalangan profesional.

Analisis terhadap media ini dapat memberikan wawasan tentang informasi yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berperan dalam pembentukan opini publik. Masyarakat kini kehilangan kemampuan untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak. Akibatnya, masyarakat lebih sering menilai informasi berdasarkan preferensi politik, bukan pada kebenaran datanya. Hal ini membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh berita yang tidak faktual dan tanpa sumber jelas karena lebih mengutamakan kesesuaian dengan pandangan politiknya dibanding keakuratan informasi. (Anggoro, 2014). Pada saat yang sama, demokratisasi informasi melalui media sosial telah menggeser kekuasaan naratif

dari institusi media tradisional ke tangan masyarakat luas, menciptakan lanskap informasi yang lebih beragam namun juga lebih terfragmentasi. Hal ini menegaskan pentingnya literasi media dan pemikiran kritis dalam memahami peristiwa-peristiwa sosial-politik di era digital.

Cara media membingkai aksi Indonesia Gelap secara langsung memengaruhi bagaimana publik memahami dan merespons aksi tersebut. Analisis framing membantu mengungkap mekanisme yang digunakan media dalam mengarahkan interpretasi audiens, melalui pemilihan diksi, penempatan berita, pemilihan narasumber, atau penekanan pada aspek tertentu dari demonstrasi. Dengan memahami mekanisme ini, penelitian dapat menunjukkan bagaimana Tempo membentuk dukungan atau penolakan publik terhadap tuntutan demonstran, legitimasi aksi, atau kebijakan pemerintah yang diprotes. Penggunaan analisis framing untuk mengetahui dan menganalisis suatu keadaan sebenarnya yang dibangun dan dikemas oleh media (Sari, 2023). Melalui analisis sistematis terhadap siapa yang diberi platform untuk berbicara, sudut pandang mana yang diutamakan, dan narasi apa yang diberi legitimasi (Entman, 2007).

Analisis framing memungkinkan kritik terhadap klaim objektivitas dalam praktik jurnalistik. Dengan mengidentifikasi pola pembingkaian pada pemberitaan aksi Indonesia Gelap, penelitian dapat menunjukkan bagaimana nilai-nilai subjektif dan interpretasi secara tak terhindarkan memengaruhi produksi berita, bahkan di media seperti Tempo. Kesadaran ini penting untuk memajukan literasi media dan pemikiran kritis di kalangan publik, serta mendorong praktik jurnalistik yang lebih reflektif dan transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana framing Tempo dalam memberitakan berita dengan tag Indonesia Gelap berdasarkan model framing Robert N. Entman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis framing Tempo dalam memberitakan berita dengan tag Indonesia Gelap dengan menggunakan model framing Robert N. Entman, yang meliputi pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan memberikan solusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi, khususnya dalam bidang analisis framing media.
2. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media dengan latar belakang yang berbeda membingkai peristiwa sosial-politik yang sama, dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman sebagai kerangka teoretis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sebagai pengalaman tersendiri dan dapat memberikan manfaat, juga untuk referensi peneliti selanjutnya.
2. Bagi praktisi media, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi kritis tentang bagaimana praktik jurnalistik, khususnya dalam pembingkaiannya, dapat

mempengaruhi pemahaman publik tentang isu-isu sosial politik yang sedang terjadi.

3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan literasi media, khususnya dalam memahami bagaimana berita dikonstruksi dan dibingkai oleh media dengan berbagai kepentingan.